



# **MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MELALUI WBK/WBBM**

**GELAR PENGAWASAN DAERAH KOTA MAGELANG  
KAMIS, 2 DESEMBER 2021**



## Ratna Wijihastuti, SE., M.Sc

### BIODATA

Koordinator Pengawasan Bidang P3A

### Latar Belakang Pendidikan:

S1 Akuntansi UGM 2004

S2 Magister Studi Kebijakan UGM 2015

### Pengalaman sebelumnya:

PFA pada Perwakilan BPKP DIY 1998-2015

PFA pada Deputi PKD dan DAN, BPKP 2016

Kasubag Hubungan Antar Lembaga BPKP 2016-2017

Kasubag Komunikasi Publik BPKP 2017 – 2020

Kepala Bagian TU Perwakilan BPKP DIY 2020 - 2021





# DASAR HUKUM PERMENPAN RB TENTANG ZI

1

Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi



Permen PANRB  
20 / 2012

2

Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan K/L dan Pemda



Permen PANRB  
60 / 2012

4

Permen PANRB 10 / 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Men PAN RB No 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah



Permen PANRB  
10 / 2019

3

Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah



Permen PANRB  
52 / 2014



# Reformasi Birokrasi dalam RPJMN dan RPJMD

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

**RPJMN Tahun  
2020-2024**

Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan Indikator Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Indeks RB baik ke atas sebesar 70% pada Tahun 2024.

**RPJMD Tahun  
2016-2021**

Indikator Program % Zona Integritas yang terbentuk, dengan target capaian kinerja 50 pada Tahun 2021

# Peran BPKP



BPKP memiliki peran strategis dalam proses reformasi birokrasi nasional yaitu Kepala BPKP sebagai Ketua Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui SK Ketua Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)



## Reformasi Birokrasi

- Salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien
- Untuk melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional

## Sasaran Program RB

- Birokrasi yang Bersih dari KKN dan Akuntabel
- Birokrasi yang Efektif dan Efisien
- Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

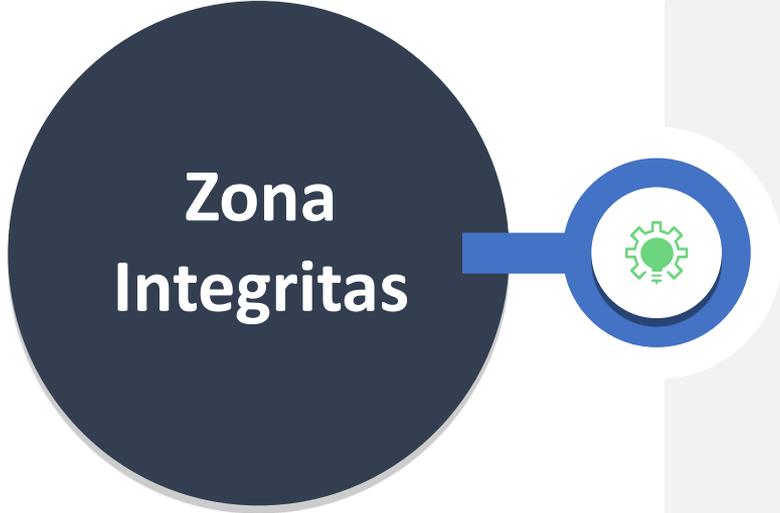
## Kendala

- Penyalahgunaan wewenang
- KKN
- Lemahnya pengawasan

## Akselerasi

- Instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

A dark blue circle containing the text 'Zona Integritas' is connected to a light blue circle containing a green gear icon. A blue horizontal bar connects the two circles.

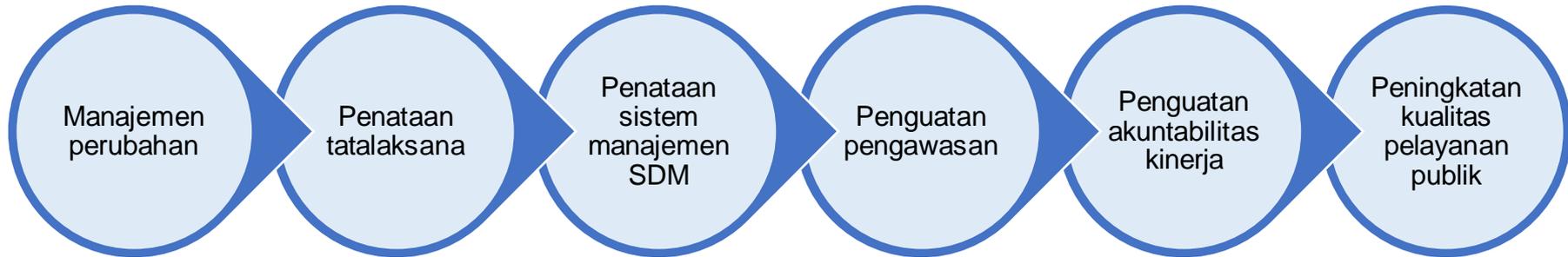
## Zona Integritas

Predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB, khususnya dalam hal **pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

(Menurut Permen PANRB 10 Tahun 2019)

# Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

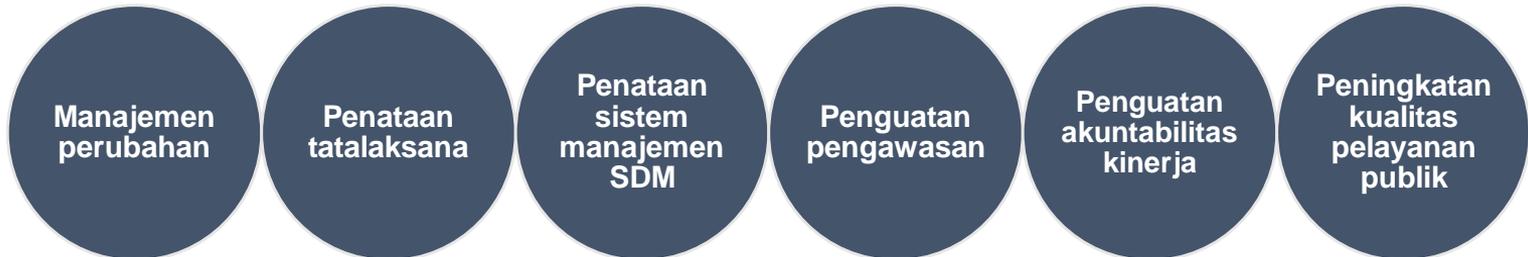
Predikat yang diberikan kepada **suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian** besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan :

A yellow circular icon containing two white interlocking gears, positioned to the left of the text block.

Serta **didukung dengan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi (minimal 13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan menyatakan baik**, serta telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal.

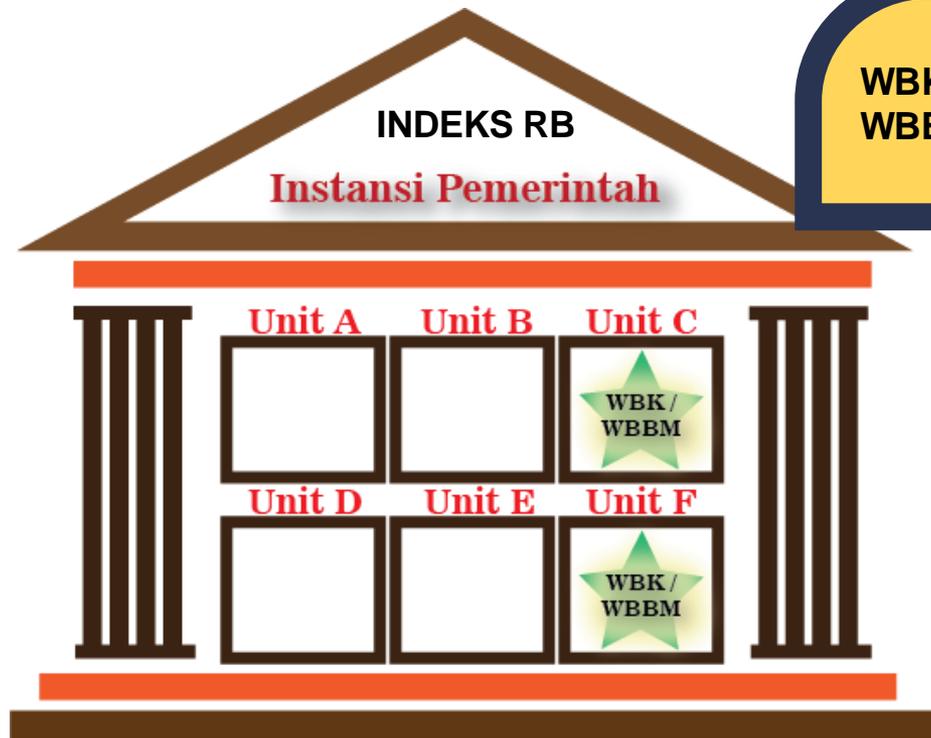
# Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Predikat yang diberikan kepada **suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian** besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan :

A yellow circular icon with two white gears is positioned to the left of the text block.

serta **didukung dengan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi tinggi** (minimal 13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%) **dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik yang sangat baik** (minimal 16 dari nilai maksimal 20 atau 80%), **serta telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan** oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal.

# Ilustrasi Program RB & Pembangunan ZI Melalui WBK/WBBM



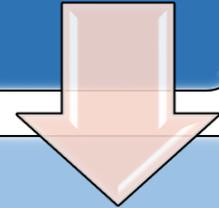
## WBK dan WBBM

Merupakan Predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi (KKN) dan melayani publik dengan baik. **yaitu telah memenuhi sebagian** besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan :

- Manajemen perubahan
- Penataan tatalaksana
- Penataan sistem manajemen SDM
- Penguatan pengawasan
- Penguatan akuntabilitas kinerja
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

# Hakikat Pembangunan Zona Integritas

Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan K/L/Pemda



Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai Unit Menuju WBK-BBM



# Tahap Pembangunan Zona Integritas

## PENCANANGAN ZI

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
- Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas

## PEMBANGUNAN ZI

- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan WBK/WBBM
- Membangun unit kerja WBK/WBBM

## PENGUSULAN

- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
- Pengusulan ke Kemen PAN RB

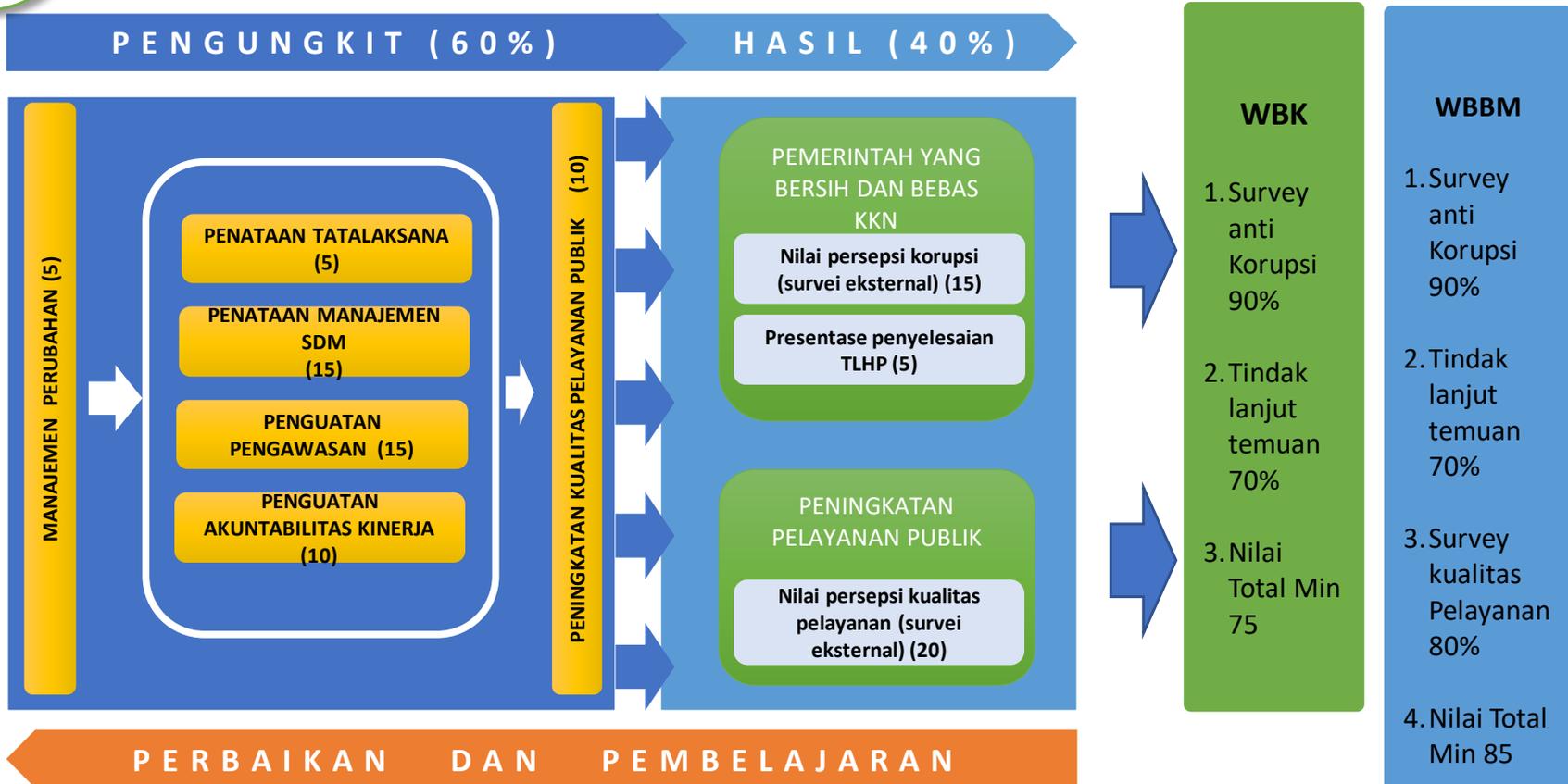
## REVIU TPN

- Reviu oleh Tim Penilai Nasional

## PENETAPAN WBK/WBBM

- MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBK
- MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

# KOMPONEN PEMBANGUNAN ZI MELALUI WBK/WBBM



# SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM



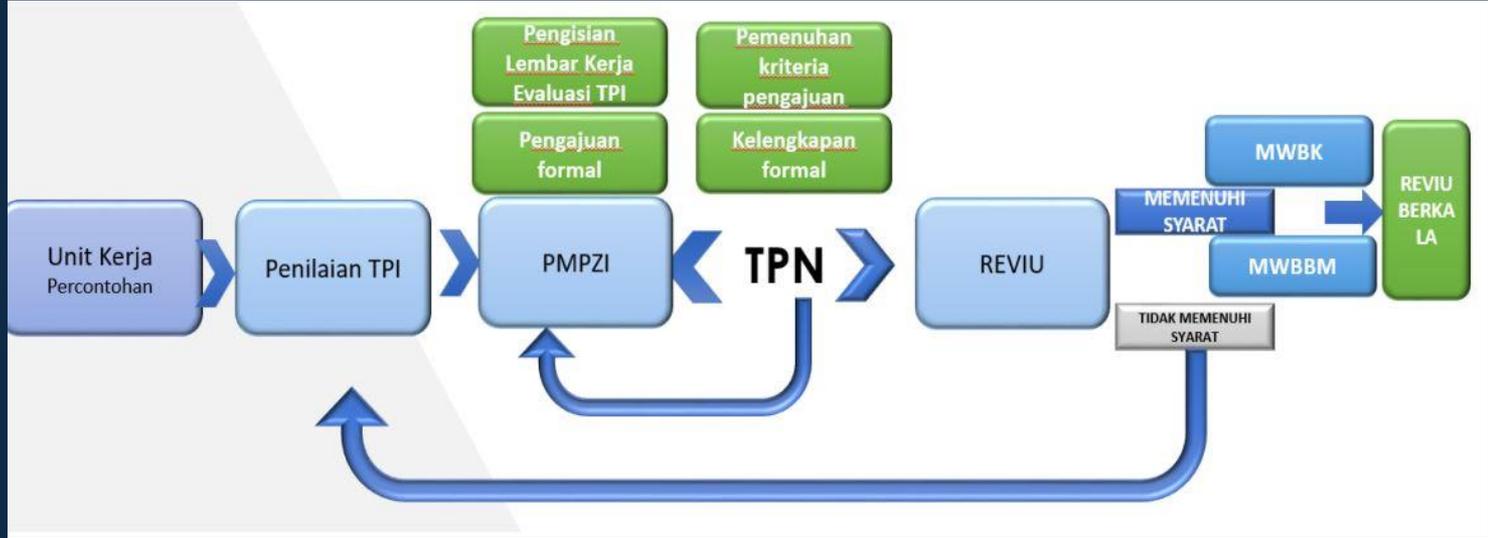
SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
TINGKAT UNIT KERJA	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

# PEMENUHAN KATEGORI WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total ( <b>Pengungkit dan Hasil</b> ) minimal	75	85
Bobot nilai per area pengungkit minimal	60%	75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18,5	18,5
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5	13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	5	5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	16	18
Kewajiban LHKPN atau LHKASN	Seluruh pegawai	Seluruh pegawai



# PENILAIAN INTERNAL UNTUK PEMDA



## Implementasi di Pemkot Magelang

### Unit Kerja Percontohan :

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### TPI (Tim Penilai Independen) :

- Inspektorat



# SPIP DAN ZONA INTEGRITAS MELALUI WBK DAN WBBM



**MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MELALUI WBK DAN WBBM**

**PERAN SPIP INTEGRASI**



## PERENCANAAN/PENETAPAN TUJUAN



K/L/D:



TUJUAN:

SASARAN:

INDIKATOR:

STRATEGI PENCAPAIAN



PROGRAM:

KEGIATAN:

INDIKATOR:

**APAKAH SUDAH TEPAT?**

## KONDISI SISTEM PENGENDALIAN INTERN



**APAKAH TERUS DITINGKATKAN KUALITASNYA?**

## KETERCAPAIAN TUJUAN



CAPAIAN KINERJA  
(OUTCOME DAN OUTPUT):



PENURUNAN/KENAIKAN JUMLAH  
TEMUAN DALAM LAPKEU:



KONDISI KEAMANAN ASET  
(FISIK DAN ADMINISTRASI):



PENURUNAN/KETERJADIAN  
FRAUD/TIPIKOR:

**PEMBAHARUAN  
METODOLOGI  
PENILAIAN  
DIPERLUKAN DALAM  
RANGKA  
MENGKAITKAN 3  
ASPEK TERSEBUT.**



# Keterkaitan Unsur SPIP dengan ZI melalui WBK dan WBBM

## UNSUR-UNSUR SPIP

Lingkungan Pengendalian

Penilaian Risiko

Kegiatan Pengendalian

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian Intern

## PENGUNGKIT

Manajemen Perubahan (5)

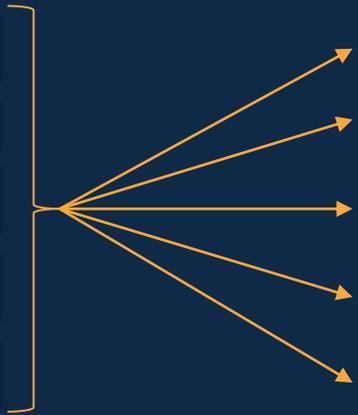
Penataan Tatalaksana (5)

Penataan Manajemen SDM (15)

Penguatan Pengawasan (15)

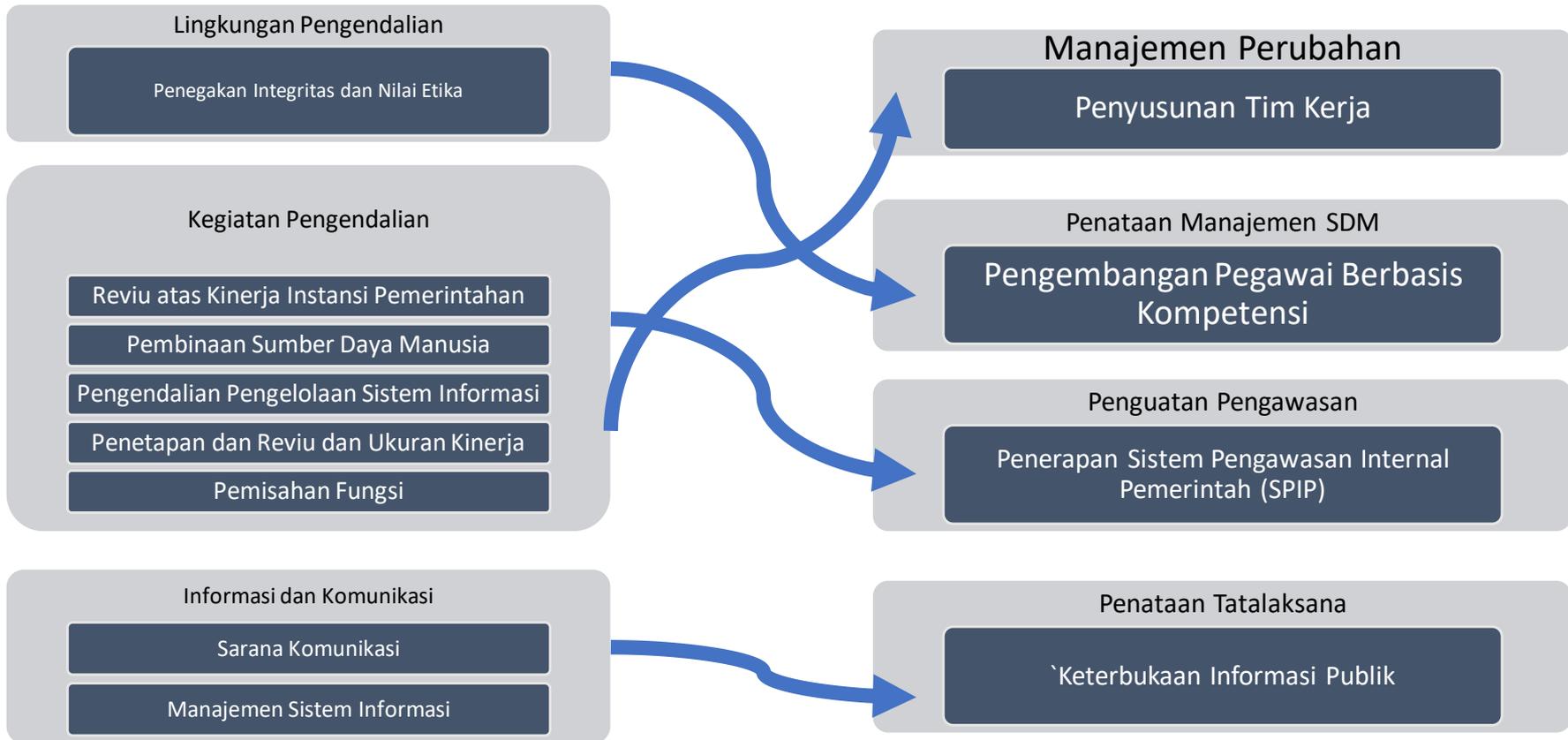
Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10)





# Keterkaitan Unsur SPIP dengan ZI melalui WBK dan WBBM





# Indikator Penguatan Pengawasan

## Pengendalian Gratifikasi

- unit kerja telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi;
- unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

## Penerapan SPIP

- unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
- unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan
- unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

## Pengaduan Masyarakat

- unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

## Whistle-Blowing System

- unit kerja telah menerapkan *whistle blowing system*;
- unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan
- unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.



**“Jika Integritas tidak menjadi prioritas, maka  
*Good Governance* hanyalah angan sepintas”**

**ZONA  
INTEGRITAS**





# Terima Kasih

